

## **BAB III**

### **Pemisahan Agama dan Politik dalam Islam di Indonesia oleh Pemerintah Hindia Belanda**

#### **III.1 Masa Sebelum Kedatangan Snouck Hurgronje**

Agama Islam adalah agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia. Dalam usaha menguasai Indonesia, Belanda selalu berhadapan dengan masyarakat Islamnya. Pada awalnya, dalam menghadapi Islam di Indonesia, pemerintah Belanda mengambil tindakan untuk tidak ikut campur dalam segala macam urusan Islam, karena pada saat itu pemerintah Belanda kurang memiliki pengetahuan tentang Islam.

Tidak mau ikut campurnya pemerintah Belanda terhadap urusan Islam ialah karena Belanda merasa takut dengan Islam. Belanda mengira bahwa Islam sama dengan Katolik. Belanda menganggap umat Islam di Indonesia memiliki hubungan dengan ke-Khalifahan Turki Usmani, sama halnya dengan agama Katolik, yaitu umat Katolik di segala penjuru dunia memiliki hubungan dengan Paus di Roma, dan segala macam permasalahan yang menyangkut umat Katolik tersebut, akan diselesaikan dengan tanggung jawab Paus di Roma. Untuk itu Belanda memilih sikap untuk tidak ikut campur terhadap urusan Islam, karena takut akan mendapat ancaman dari Khalifah Turki apabila Belanda mengusik ketenangan umat Islam yang ada di Indonesia. Selain belum memiliki pengetahuan yang jelas mengenai Islam, pemerintah Belanda juga masih belum mengetahui tentang sistem sosial Islam.

Pada awalnya, dalam menghadapi Islam di Indonesia, pemerintah Belanda belum mempunyai kebijaksanaan yang jelas mengenai urusan yang berhubungan dengan Islam. Kebijaksanaan untuk tidak mencampuri urusan agama Islam

tersebut, pada kenyataannya tidak memiliki garis kerja yang jelas. Pada tahun 1859, Gubernur Jendral dibenarkan untuk mencampuri masalah agama, bahkan harus mengawasi setiap gerak-gerik para ulama, bila dianggap perlu demi kepentingan ketertiban dan keamanan.<sup>33</sup> Ketakutan Belanda terhadap Islam muncul karena pada kenyataannya Islam seringkali melakukan perlawanan kepada pemerintah Belanda yang dapat menimbulkan bahaya terhadap kekuasaan pemerintah Belanda di Indonesia. Islam dilihat memiliki fungsi sebagai titik pusat identitas yang melambungkan perlawanan terhadap pemerintah asing dan beragama Kristen, yang ingin menguasai Indonesia. Pemerintah Kristen tersebut adalah pemerintahan kafir yang harus dilawan, karena berusaha untuk mengambil alih wilayah kekuasaan Islam.

Banyaknya perlawanan-perlawanan rakyat Indonesia kepada pemerintah Belanda membuat ketakutan Belanda terhadap kekuatan Islam menjadi semakin besar. Pemerintah Belanda terus mencari jalan keluar dalam usaha menguasai wilayah Indonesia. Maka di hampir seluruh lembaga pendidikan di Negeri Belanda, dilakukan kajian dalam mempelajari Islam.

Banyaknya perlawanan yang dilakukan masyarakat Islam Indonesia tersebut, mengharuskan pemerintah Belanda melakukan pemisahan antara agama dan politik dalam Islam. Setelah terjadinya pemisahan tersebut, diharapkan masyarakat Islam yang fanatik terhadap agama, tidak akan mencampuri urusan politik, sehingga perlawanan terhadap pemerintah Belanda akan dapat ditekan dan diatasi. Pemerintah Belanda tidak bisa mentolerir timbulnya gerakan-gerakan fanatisme Islam yang dinilainya dapat menggoyahkan kekuasaan Belanda di Indonesia.

---

<sup>33</sup> Keputusan Raja tanggal 4 Februari 1859 no. 78, berbunyi: "Gubernur Jendral yang memegang prinsip bahwa pemerintah tidak boleh mencampuri urusan agama, boleh mencampurinya bila dipandang perlu untuk memelihara ketenangan dan ketertiban umum", baca Aqib Suminto. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES, 1985. Hal. 10.

## III.2 Masa Setelah Kedatangan Snouck Hurgronje ke Indonesia

### III.2.1 Snouck Hurgronje

Untuk membantu dalam menghadapi Islam di Indonesia, pemerintah Belanda mendatangkan seorang sarjana Belanda yang sangat memahami tentang Islam, yaitu Christiaan Snouck Hurgronje. Ia adalah seorang sarjana Belanda yang mempelajari tentang Teologi Islam dan Sastra Arab di Universitas Leiden, Belanda. Ia mencapai gelar Doktor dengan disertasinya yang berjudul *Het Mekaansche Feest* (Perayaan Mekkah). Yang dimaksud Perayaan Mekkah itu ialah pelaksanaan ibadah haji yang dilaksanakan setiap tahun oleh umat Islam. Ia juga pernah bermukim (*muqim*) di Mekkah selama setahun, dengan nama Abdul Ghoffar, untuk mempelajari kehidupan masyarakat Islam langsung di pusatnya. Pada saat berada di Makkah (*muqim*), Snouck Hurgronje bertemu dengan banyak ulama-ulama Islam dari berbagai penjuru dunia, termasuk ulama dari Indonesia. Dengan melakukan hubungan dengan ulama-ulama itu, Snouck akhirnya juga mempelajari tentang masyarakat Islam di banyak Negara, juga sistem kemasyarakatan Islam di Indonesia. Ia sangat tertarik dengan kehidupan masyarakat Islam di Indonesia, dan ingin datang ke Indonesia untuk mempelajari secara langsung sistem masyarakat Islam di Indonesia.

Sekembalinya dari bermukim di Makkah, Snouck mengajukan kepada pemerintah Belanda di Negeri Belanda untuk melakukan penelitian terhadap masyarakat Islam di Indonesia. Akhirnya pada tahun 1889, Snouck Hurgronje sampai ke Indonesia dengan izin melakukan penelitian. Oleh pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia, Snouck diangkat sebagai *Adviseur voor Inlandsche zaken*, yaitu penasehat untuk mengurus masalah-masalah ketimuran dan bahasa Arab, karena ia memiliki pengetahuan yang luas tentang Islam. Pemerintah Hindia Belanda juga meminta kepada Snouck Hurgronje untuk membantu pemerintah Belanda dalam menghadapi masyarakat Indonesia, yang mayoritasnya adalah beragama Islam.

Snouck Hurgronje juga telah berhasil melawan ketakutan Belanda selama

ini tentang Islam. Ia menegaskan bahwa dalam Islam tidak dikenal lapisan kependetaan semacam dalam Katolik, seperti yang dahulu ditakutkan Belanda. Ia juga menegaskan bahwa pada hakekatnya orang Islam ialah orang-orang yang penuh dengan damai, namun, Islam juga memiliki kemampuan politik yang fanatik. Apabila mereka menemukan kekuatan lain yang dianggap mengganggu ketentraman masyarakat Islam, maka kekuatan lain tersebut wajib dilawan oleh seluruh umat Islam. Yang dimaksud kekuatan lain itu adalah kekuatan yang berasal dari orang-orang yang tidak seagama dengan mereka, yaitu kekuatan orang-orang kafir. Menurut Snouck Hurgronje, musuh Belanda yang sedang dihadapi bukanlah Islam sebagai doktrin agama, melainkan Islam dalam hal politik.

Makin banyak terjadinya perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang dilatarbelakangi semangat keagamaan, mengharuskan pemerintah Belanda untuk menemukan cara dalam menghadapi Islam di Indonesia, supaya pemerintah Belanda dapat menerapkan sistem hukumnya di Indonesia. Atas usul yang diberikan oleh Snouck Hurgronje, akhirnya pemerintah Belanda melakukan pemisahan antara agama dan politik dalam Islam dengan tujuan untuk mengurangi terjadinya perlawanan dari masyarakat Islam kepada pemerintah Belanda. Belanda berpikir, jika agama dan politik dipisahkan dalam Islam, maka para ulama yang fanatik terhadap agama, tidak akan lagi mencampuri urusan politik, sehingga tidak akan ada lagi pemberontakan dalam melawan pemerintah Belanda di Indonesia.

### III.2.2 Politik Islam Hindia Belanda

Pada dasarnya, dalam Islam terdapat ajaran untuk menjalankan seluruh aspek kehidupan umat manusia. Seorang umat dalam menjalankan kehidupannya harus berada di dalam sebuah sistem kehidupan. Di dalam sistem kehidupan itu terdapat urusan agama (hubungan langsung dengan Tuhannya); urusan sosial kemasyarakatan, yaitu segala macam aktivitas yang berhubungan dengan manusia lain, seperti perkawinan, budaya, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan teknologi;

dan urusan politik, yaitu urusan pemerintahan, yang juga merupakan bentuk hubungan dengan manusia lain. Dalam Islam, semuanya itu diatur di dalam al-Quran. Walaupun hampir 90% kehidupan manusia yang dijalankan sehari-harinya ialah bentuk aktivitas yang berhubungan dengan manusia lain, namun masyarakat Islam tetap menjalaninya berdasarkan perintah Allah di dalam al-Quran.

Setelah mengetahui tentang sistem Islam tersebut, maka pemerintah Belanda membagi aspek kehidupan Islam dalam arti "ibadah", dengan Islam sebagai "kekuatan politik". Dalam menghadapi Islam di Indonesia, pemerintah Belanda mengeluarkan beberapa kebijaksanaan, yang dikenal dengan istilah *Islam Politiek*, dan Snouck Hurgronje merupakan orang yang membantu pemerintah Belanda dalam menetapkan kebijaksanaan tersebut.

Berdasarkan sistem kehidupan umat Islam yang telah dipelajarinya, Snouck Hurgronje membagi permasalahan Islam dalam tiga kategori, yaitu<sup>34</sup>:

- 1) bidang agama murni (ibadah),
- 2) bidang sosial kemasyarakatan, dan
- 3) bidang politik / ketatanegaraan.

Dalam menghadapi Islam di masing-masing bidang, alternatif pemecahan yang dilakukan pun berbeda-beda. Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda dalam menghadapi ketiga bidang permasalahan dalam Islam tersebut juga berbeda-beda.

#### 1. Bidang agama murni (ibadah) dan Kristenisasi

Pada dasarnya, pemerintah Belanda memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya, sepanjang yang dilakukannya itu tidak mengganggu kekuasaan pemerintah Belanda. Ajaran agama yang dimaksud ialah segala macam aktivitas ibadah yang dilakukan secara ritual, seperti melaksanakan rukun Islam, mengerjakan salat lima waktu, melakukan ibadah puasa, dan segala macam aktivitas yang hubungannya langsung

<sup>34</sup> Aqib Suminto. *Politik Islam Hindia Belanda: Het Kantoort voor Inlandsche Zaken*.

kepada Allah swt., sebab menjalankan aktivitas keagamaan ini tidak berbahaya bagi pemerintah Belanda.

Kebijaksanaan pemerintah Belanda yang menyatakan netral terhadap bidang agama tersebut dijalankan berdasarkan undang-undang Belanda yang tercantum dalam Undang-Undang Belanda untuk negara jajahan, yaitu pada RR (*Regeering Regliment*) no. 78 ayat 119 tahun 1855, yaitu mengakui kemerdekaan beragama dan menyatakan netral dalam masalah agama, kecuali bila aktivitas agama tersebut dinilai mengganggu ketertiban keamanan.<sup>35</sup>

Pemerintah Belanda memberikan kebebasan kepada umat Islam dalam menjalankan ibadah agamanya yang dilakukan secara ritual, karena pelaksanaan ibadah dinilainya tidak akan membahayakan kekuasaan pemerintah Belanda di Indonesia. Seorang umat yang sedang melaksanakan salat, tidak mungkin melakukan pembunuhan pada saat yang bersamaan.

Belanda, yang juga menganut paham pemikiran Barat, sangat menjunjung tinggi hak seorang umat beragama untuk berdoa kepada Tuhannya. Untuk itu, maka pemerintah Belanda memberi kebebasan kepada umat Islam yang hendak menjalankan ibadah ritualnya. Selain alasan-alasan tersebut, Belanda juga masih mewaspadaikan akan terjadinya perlawanan umat Islam, karena takut dianggap bahwa Belanda menghalang-halangi mereka dalam menjalankan perintah Tuhannya.

Pengertian netral yang dimaksud ialah tidak memihak dan tidak campur tangan sama sekali terhadap segala sesuatu yang menyangkut urusan agama tersebut, atau bisa juga membantu kesemuanya secara seimbang tanpa mencampuri urusan intern agama tersebut. Tetapi pernyataan netral terhadap agama yang telah ditetapkan pemerintah Belanda terhadap Islam berbeda antara teori dan praktiknya. Kebijakan pemerintah Belanda terhadap Islam lebih tepat dikatakan campur tangan daripada netral. Titik berat tekanannya adalah

---

<sup>35</sup> Arsip UB no. 1803, A21, Leiden. Beslit Raja no.78, tanggal 4 Februari 1859, ayat 80. Baca Aqib Suminto. *Politik Islam Hindia Belanda: Het Kantoort voor Inlandsche Zaken*. Hal. 26.

dalam menjaga *rust en orde*, yaitu ketertiban dan keamanan.<sup>36</sup> Dalam hal mencampuri masalah agama atau tidak, kebijaksanaan pemerintah Belanda bergerak diantara dua titik, yaitu "netral" dan "ketertiban keamanan". Disamping memberikan kebebasan dalam masalah agama, pemerintah Belanda juga melaksanakan pengawasan ketat terhadap segala macam aktivitas agama Islam, selama hal itu menyangkut kepentingan umum.

Selain selalu ikut campurnya pemerintah Belanda terhadap segala macam urusan dalam agama Islam, pernyataan netral tersebut juga tidak terealisasi dalam memperlakukan agama Islam jika dibandingkan dengan terhadap agama Kristen. Pada kenyataannya sering terjadi diskriminasi dalam kebijaksanaan yang berhubungan dengan agama. Hal itu dikarenakan hubungan pemerintah Belanda yang beragama Kristen dengan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, menyebabkan pemerintah Belanda tidak mampu memperlakukan pribumi yang beragama lain sama dengan jika memperlakukan pribumi yang seagama dengannya.

Pemerintah Belanda melakukan sikap diskriminatif antara memperlakukan agama Islam dengan Kristen dalam segala bidang. Sikap diskriminatif itu ditunjukkan dalam memberikan dana kepada kedua agama tersebut dengan sangat tidak seimbang. Misalnya yang terjadi pada tahun 1917, sumbangan pemerintah Belanda kepada Islam adalah berjumlah f.127.029,; sedangkan sumbangan yang diberikan kepada pihak Kristen pada tahun yang sama yaitu berjumlah f.1.235.500;. Dana yang diberikan kepada Islam tersebut hanyalah sebatas gaji yang diberikan kepada penghulu yang bekerja kepada Belanda. Sedangkan dana yang diberikan kepada agama Kristen, selain untuk gaji pastor dan pendeta, juga diberikan dana untuk membangun gereja, rumah sakit, dan sekolah-sekolah agama Kristen. Islam tidak menerima bantuan dana dari pemerintah Belanda seperti agama Kristen. Pemerintah Belanda melakukan hal tersebut karena faktor kepentingan politik. Pemerintah Belanda melakukan sikap anti-Islam, dan pada

---

<sup>36</sup> Aqib Suminto. *Politik Islam Hindia Belanda: Het Kantoort voor Inlandsche Zaken*. Hal. 4.

kenyataannya tidak bersikap netral terhadap agama, seperti yang disebutkan sebelumnya. Hal itu dilakukannya demi tetap mempertahankan kekuasaannya di Indonesia.

Ketidak-realisasinya pernyataan netral terhadap agama ini, juga menunjang terjadinya Kristenisasi di Indonesia. Pada tahun 1909, Idenburg diangkat menjadi Gubernur Jendral di Hindia Belanda. Ia dikenal sebagai orang yang moderat. Namun betapapun moderatnya ia, pernah terungkap pernyataan darinya bahwa Belanda akan tetap menguasai Indonesia sampai agama Kristen menjadi agama bangsa Indonesia. Pada saat itu, masyarakat Islam di Indonesia mengkritik tajam kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikeluarkan pemerintah Belanda. Semenjak Idenburg diangkat menjadi Gubernur Jendral Hindia Belanda, dia dianggap melancarkan *kersteningspolitiek*, yaitu kebijaksanaan yang menunjang kristenisasi di Indonesia. Kristenisasi itu makin terasa dilihat dari surat edaran yang diberikan Idenburg kepada masyarakat tentang pasar dan hari Minggu. Dalam surat edaran tersebut ia memerintahkan kepada para pegawai agar menghormati hari Minggu dengan melarang diadakannya pesta dan kegiatan pasar pada hari itu, karena hari Minggu adalah hari suci bagi umat Kristen. Pada saat ia menjabat sebagai Gubernur Jendral, kristenisasi dinilai oleh masyarakat terlalu kuat ditunjang oleh pemerintah Belanda, sehingga berarti Idenburg mengabaikan kebijaksanaan netral terhadap agama yang seharusnya diikutinya.

Kristenisasi yang didukung oleh pemerintah Belanda tersebut, bertujuan untuk menukar agama bangsa Indonesia yang mayoritas Islam, menjadi penganut agama Kristen. Usaha kristenisasi itu mendapat dukungan dari orang-orang Belanda, baik yang berada di Indonesia, maupun orang Belanda yang berada di Negeri Belanda. Mereka berharap dengan dilakukannya kristenisasi, akan menghilangkan pengaruh Islam, sehingga tidak akan ada lagi pihak yang kontra dengan Belanda, bahkan semua pihak akan mendukung pemerintah Belanda dalam usaha menerapkan sistem hukumnya di Indonesia.

Kristenisasi yang dijalankan pihak zending, didukung oleh pemerintah



Belanda dengan memberikan subsidi berupa dana dalam setiap bentuk pembangunan gereja, rumah sakit, dan sekolah-sekolah. Pembangunan-pembangunan tersebut bertujuan untuk menarik umat Islam agar sedikit banyaknya terpengaruh untuk berpindah ke agama Kristen. Dukungan pemerintah Belanda terhadap pihak Kristen tersebut mengakibatkan dakwah Islam menjadi terhambat.

## 2. Bidang sosial kemasyarakatan

Dalam bidang sosial kemasyarakatan, pemerintah Belanda memanfaatkan adat kebiasaan yang berlaku, dengan cara menggalakkan rakyat agar mendekati Belanda, bahkan Belanda akan membantu rakyat yang akan menempuh jalan tersebut. Pemerintah Belanda mengharapkan terjadinya proses asosiasi antara umat Islam dengan kebudayaan Belanda. Dan setiap usaha asosiasi yang ingin dilakukan oleh masyarakat Islam, akan dibantu oleh pihak Belanda.

Mengenai masalah perkawinan dan waris, yang dalam pandangan Barat termasuk dalam bidang hukum, ditegaskan bahwa hal itu mempunyai hak yang sama untuk dihormati sebagaimana pada bidang pertama, yaitu urusan ibadah. Namun, pada tahun 1905 pemerintah Belanda mengeluarkan kebijaksanaan dengan memberikan pengawasan terhadap urusan perkawinan dan perceraian.

Politik Islam Snouck Hurgronje dalam bidang kemasyarakatan ini adalah membuat agar masyarakat Indonesia dapat menyesuaikan diri dengan kebudayaan Belanda. Menurutnya, untuk menghadapi Islam dalam bidang sosial kemasyarakatan, hendaknya pemerintah Belanda memilih jalan halus, yaitu dengan menyalurkan semangat mereka ke arah yang menjauhi ajaran agamanya dan mendekati budaya Belanda melalui asosiasi kebudayaan.<sup>37</sup>

Politik asosiasi ini bertujuan untuk mempererat ikatan antara negeri jajahan dengan negara penjajahnya melalui kebudayaan, yaitu bermaksud memperkukuh eksistensi penjajahan Belanda di Indonesia. Masyarakat bangsa

---

<sup>37</sup> *Ibid.* Hal. 24.

Indonesia harus dituntun agar bisa berasosiasi dengan kebudayaan Belanda, dan setiap kecenderungan rakyat untuk berasosiasi harus selalu disambut dan dibantu.

Dalam proses asosiasi ini, pemerintah Belanda bekerjasama dengan para kepala adat dan menggunakan lembaga adat untuk membendung pengaruh Islam yang ada di Indonesia. Kerjasama nyata yang dilakukan pemerintah Belanda terhadap golongan adat terlihat dalam perang-perang yang dihadapi Belanda, misalnya perang Diponegoro, perang Paderi, dan perang Aceh. Belanda membuat supaya orang-orang Islam berperang dalam menghadapi Belanda dan kaum adat sekaligus.

### 3. Bidang politik.

Sikap pemerintah Belanda dalam menghadapi Islam sebagai kekuatan politik yaitu dengan mencegah setiap usaha yang akan membawa rakyat kepada fanatisme dan Pan-Islamisme. Berdasarkan informasi yang diberitahukan oleh Snouck Hurgronje, pemerintah Belanda akhirnya memahami, bahwa dalam sistem ajaran Islam, tidak terjadi pemisahan antara ibadah agama yang dilakukan secara ritual, dengan politik dalam pengaturan pemerintahan. Untuk itu, Belanda menekan dan menghalangi setiap gerakan politik yang dilakukan masyarakat Islam, karena akan membahayakan kekuasaan pemerintah Belanda di tempat yang penduduknya mayoritas beragama Islam ini.

Pemerintah Belanda melakukan pengawasan yang sangat ketat terhadap pelaksanaan ajaran Islam dalam bidang politik. Tidak akan diterima segala macam usaha yang dilakukan masyarakat Islam dalam melaksanakan kegiatan politik, karena setiap usaha politik yang dilakukan masyarakat Islam akan mengancam eksistensi kekuasaan pemerintah Belanda di Indonesia. Pemerintah Belanda juga mewaspadaikan dan meminimalisir masuknya ide Pan-Islamisme ke Indonesia.

Mengenai bidang politik ini, ditekankan pula oleh pihak pemerintah Belanda agar setiap pegawai pemerintah tidak menggabungkan Pan-Islamisme dengan tugas dan jabatannya. Maksudnya, seorang pegawai pemerintah tidak

dibenarkan mengikuti ide Pan-Islamisme, meskipun ia seorang muslim.

Pemerintah Belanda selalu bersikap waspada terhadap segala kemungkinan yang dapat membahayakan kekuasaannya di Indonesia. Dalam hal ini, para haji sering dicurigai sebagai faktor utama yang membawa pengaruh Pan-Islamisme dari luar, sehingga mereka selalu diawasi dalam kegiatannya. Dalam bentuk sikap waspada terhadap kekuatan politik Islam, maka pemerintah Belanda juga melakukan pengawasan kepada para haji. Semakin meningkatnya pengawasan politik oleh pihak Belanda telah menimbulkan rasa tersingkir dan frustrasi yang mendalam di kalangan kaum elit agama.

Setiap gerakan perlawanan rakyat yang selama ini diterima Belanda yaitu dilakukan oleh masyarakat Islam bangsa Indonesia dalam menjalankan ajaran Islam dalam bidang politik. Umat Islam akan melawan setiap usaha penjajahan yang dilakukan oleh pihak lain yang beragama lain dengan Islam, karena memerangi bangsa kafir yang ingin menghancurkan sistem Islam ialah bagian dari ibadah.

Pada tahun 1882, Lembaga Peradilan Agama diresmikan oleh pemerintah, sehingga dengan demikian politik tidak akan mencampuri masalah agama.<sup>38</sup> Seorang penghulu yang mengurus permasalahan Islam, diangkat menjadi pegawai pemerintah Hindia Belanda, dan diberi gaji oleh pemerintah Belanda. Sehingga diharapkan para penghulu itu bersikap pro kepada Belanda, walaupun mereka seorang muslim.

### III.2.3 Pemisahan Agama dan Politik dalam Islam

Setelah memahami tentang sistem Islam dan ajaran yang dijalankan oleh masyarakat Islam, Belanda akhirnya memiliki keberanian dalam menghadapi Islam di Indonesia. Atas usul dari Snouck Hurgronje, akhirnya Belanda memutuskan untuk melakukan pemisahan antara agama dan politik dalam Islam. Belanda akhirnya memahami, bahwa dalam melawan Islam, Belanda tidak

---

<sup>38</sup> Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, hlm. 29.

mungkin dapat menghancurkan Islam dari luar, seperti yang dilakukan pemerintah Belanda selama ini. Tapi, Islam hanya dapat dihancurkan dari dalam, yaitu dengan membuat supaya umat Islamnya tidak lagi menjalankan ajaran Islam secara keseluruhannya.

Dalam menghadapi Islam, pemerintah Belanda juga mengalami banyak kesulitan. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah Belanda dalam usaha melakukan pemisahan antara agama dan politik dalam Islam.

Beberapa usaha yang dilakukan pemerintah Belanda dalam pelaksanaan pemisahan agama dan politik dalam Islam, yaitu:

1. Pembatasan Haji

Pemerintah Belanda melihat bahwa banyaknya perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Islam di Indonesia, kebanyakan dipimpin oleh para haji. Sepulang dari menunaikan ibadah haji, mereka menjadi semakin fanatik dan pemahaman mereka semakin mendalam tentang Islam. Sikap netral yang semula diberikan kepada pemerintah Belanda kepada Islam dalam menjalankan aktivitas keagamaannya, membawa dampak kemajuan pada sebagian besar umat Islam. Mereka menjadi semakin taat dalam menjalankan perintah agama, seperti melakukan salat, berpuasa, dan melaksanakan ibadah haji. Selain itu, pembangunan sejumlah besar masjid dan musalah juga dipandang sebagai satu pertanda meningkatnya ketaatan beribadah umat Islam.

Setelah dibukanya terusan Suez di Mesir pada tahun 1869, masyarakat Islam Indonesia semakin banyak yang menjalankan ibadah haji ke Makkah. Setiap tahunnya umat Islam yang menjalankan ibadah haji bisa mencapai ribuan orang jumlahnya. Ibadah haji yang dilakukan umat Islam setiap tahunnya itu merupakan bentuk pelaksanaan rukun Islam yang kelima.

Di Makkah, umat Islam bangsa Indonesia bertemu dengan umat Islam dari segala penjuru dunia. Melalui ibadah haji itu, umat Islam

bangsa Indonesia dapat berkomunikasi dengan umat Islam dari wilayah lain. Di sana, mereka akan membicarakan tentang permasalahan Islam yang sedang mereka hadapi, untuk nantinya dimusyawarahkan dalam mencari penyelesaian masalah yang sedang dihadapi masing-masing umat. Hal itu yang menyebabkan para haji yang baru pulang dari Makkah dalam melaksanakan ibadah haji, segera melakukan pembaharuan terhadap kondisi Islam di Indonesia, ketika sampai di tanah air. Benih Pan-Islamisme juga terbukti membawa pengaruh kepada para haji yang sudah lama bermukim di Makkah. Sistem komunikasi di dunia Islam telah dibangun dengan sangat baik melalui pelaksanaan ibadah haji. Berarti, berita-berita tentang komunitas Islam di tempat yang jauh sekalipun, akan sampai kepada umat Islam yang ada di Indonesia. Kontak yang lebih erat antara daerah-daerah yang sangat berjauhan satu sama lain dalam dunia Islam telah dipermudah oleh ibadah haji yang terus meningkat setiap tahunnya, dan dengan adanya komunikasi dan perjalanan yang lebih baik pada saat menunaikan ibadah haji.

Di Indonesia, para haji itu menghadapi pemerintah Belanda yang ingin menguasai wilayah Indonesia, maka mereka menentang hal tersebut dengan melakukan perlawanan. Sebelum kedatangan Belanda, sistem yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum Islam. Berarti, jika Belanda ingin menerapkan sistem hukumnya di Indonesia, Belanda harus terlebih dahulu menghancurkan sistem Islam, dan merubahnya dengan sistem Belanda.

Terjadinya semangat keagamaan yang besar dalam kalangan umat Islam Indonesia, menjadikan semakin bertambahnya jumlah orang yang menunaikan ibadah haji. Meningkatnya ibadah haji ini sangat penting artinya bagi Belanda, bukan hanya bagi penyebaran pembaharuan-pembaharuan di seluruh dunia Islam, melainkan juga bagi pertumbuhan suatu golongan elit agama. Oleh sebab itu, maka Makkah dapat dipandang

sebagai jantung kehidupan agama Islam.

Ketakutan Belanda terhadap ide Pan-Islamisme yang dibawa oleh para haji ke Indonesia, dibuktikan dengan semakin berkembangnya kehidupan beragama. Karakteristik kehidupan masyarakat ialah dengan bersikap anti-Barat. Penaklukan-penaklukan yang dilakukan imperialisme Barat terhadap wilayah umat Islam, membuat para pemikir agama menjadi sadar, bahwa dunia Islam sebenarnya sedang terancam bahaya yang lama kelamaan akan jatuh ke bawah dominasi Barat. Menghadapi ancaman dari Barat ini, umat Islam menampakkan sikap fanatisme yang militan dan perasaan benci terhadap penakluk-penakluk yang kafir itu.

Umat Islam melihat adanya pemerintah Belanda di Indonesia akan mengganggu tatanan sistem Islam. Maka dengan dipimpin oleh para haji yang masih memiliki semangat ke-Islaman yang besar, dilakukanlah perlawanan terhadap kekuasaan pemerintah Belanda di Indonesia. Rakyat sangat menghormati para haji, sehingga para haji itu dapat menggunakan pengaruh mereka untuk mendorong rakyat agar lebih mentaati kewajiban-kewajiban agama mereka. Para haji itu juga dapat menggerakkan rakyat dalam jumlah besar untuk sama-sama melawan pemerintahan Belanda.

Menurut anggapan di kalangan masyarakat Eropa, Makkah hanya merupakan tempat persemaian fanatisme keagamaan, dimana kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji ditanamkan perasaan permusuhan terhadap penguasa-penguasa Kristen di tanah air mereka.<sup>39</sup> Berbagai macam langkah yang telah diambil untuk menempatkan seluruh penyelenggaraan perjalanan naik haji di bawah pengawasan pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah Belanda tidak hanya berusaha keras untuk mengurangi resiko dan bahaya yang dihadapi dari orang-orang yang naik haji, tetapi juga berusaha mengawasi segala kegiatan dan gerak-gerik mereka di desa-desa tempat asal mereka setelah pulang dari haji. Para haji

---

<sup>39</sup> Sartono Kartodirdjo. *Pemberontakan Petani Banten 1888*. Hal. 216.

yang dinilai berbahaya ialah mereka yang sudah lama tinggal di Makkah (*muqim*) dalam waktu yang cukup lama. Mereka mempunyai cukup waktu dan kesempatan untuk bertukar pikiran dengan sesama muslim di daerah lain di dunia Islam. Perjalanan naik haji itu telah melahirkan satu benteng solidaritas yang ampuh di dunia Islam, dan bahwa orang-orang yang telah menunaikan ibadah haji itu pulang ke negeri mereka dengan membawa semangat kebesaran dan keagungan Islam. Dari sudut pandang kolonial, terjadi perubahan yang radikal dalam pandangan para haji itu mengenai bangsa-bangsa Barat. Di satu pihak, mereka membenci dan memandang rendah kaum kafir, dan di lain pihak, mereka merasa yakin akan pengaruh Islam yang tiada bandingannya. Selama ada orang-orang yang naik haji, maka selama itu pula berlangsung terus hubungan-hubungan religio-politik yang esensial antara Makkah, dengan masyarakat-masyarakat Islam yang berada di segala penjuru dunia, termasuk Indonesia.

Selama bermukim di Makkah, orang-orang Indonesia terus berhubungan, tidak hanya dengan anggota-anggota kerabat dan orang-orang Islam yang berasal dari tanah air mereka saja, melainkan juga dengan umat Islam dari negara lain yang sama-sama sedang menunaikan ibadah haji. Dengan cara inilah diciptakan perasaan yang sama untuk menyebarkan perasaan permusuhan terhadap segala bentuk penjajahan yang dilakukan oleh pemerintah Barat terhadap kekuasaan Islam. Pemerintah Belanda juga merasa khawatir dengan adanya sejumlah haji yang "terinfeksi" dengan pemahaman Pan-Islamisme.

Setelah pulang ke tanah air, para haji itu tampil sebagai orang-orang yang gigih mendukung gerakan ke arah generasi agama, yang bertujuan memperkuat sendi-sendi keagamaan. Mereka menentang sikap yang melalaikan ajaran agama dan berusaha memulihkan cita-cita Islam yang murni. Tidak mengherankan jika kampanye-kampanye yang gigih ini sering kali diikuti oleh pemberontakan-pemberontakan yang sesungguhnya

terhadap penguasa-penguasa yang tidak seagama dengannya.

Melihat hal itu, pemerintah Belanda berusaha mencegah terjadinya pelaksanaan ibadah haji bagi masyarakat Indonesia. Namun, pemerintah Belanda tidak akan dapat menghentikan kebiasaan naik haji yang dilakukan setiap tahun oleh umat Islam. Walaupun sudah diberlakukan biaya yang besar bagi umat Islam yang hendak menunaikan ibadah haji, namun tidak menggoyahkan semangat mereka dalam menunaikan ibadah haji. Segala peringatan yang dikeluarkan pemerintah Belanda sehubungan dengan pelarangan ibadah haji, justru menimbulkan hasrat yang lebih besar bagi umat Islam untuk tetap menjalankan ibadah haji. Orang-orang Belanda di Indonesia juga mendukung terhadap pelarangan ibadah haji. Ada juga yang mengusulkan untuk menembak mati para haji yang baru pulang dari menjalankan ibadah haji.<sup>40</sup>

Pada tahun 1859, pemerintah Belanda mengeluarkan suatu ordonansi yang mengatur masalah ibadah haji, yaitu agar pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah haji lebih diperketat lagi. Belanda mengeluarkan kebijaksanaan tersebut berhubungan dengan banyak terjadinya perlawanan rakyat kepada pihak Belanda yang dipimpin oleh para haji, seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan, yaitu terjadinya Perang Banjar, perlawanan rakyat di Garut dan Cilegon.

Setiap tahun, ribuan umat Islam Indonesia melaksanakan ibadah haji ke Makkah, sebagai bentuk pelaksanaan rukun Islam yang kelima. Para mukmin Indonesia tersebut, banyak yang membawa ajaran ortodoks setelah pulang dari menunaikan ibadah haji. Pemerintah Belanda juga melihat bahwa banyaknya perlawanan rakyat yang ditujukan kepada pemerintah Belanda memang banyak yang dimotori dan dipimpin oleh para haji. Dari kalangan orang-orang Belanda banyak yang menginginkan dilarangnya pelaksanaan ibadah haji, karena ibadah haji dinilai

---

<sup>40</sup> Aqib Suminto. *Politik Islam Hindia Belanda: Het Kantoort voor Inlandsche Zaken*.



menyebabkan masyarakat Indonesia menjadi fanatik. Banyak pendapat dari kalangan orang Belanda yang menyatakan bahwa pemerintah Belanda harus segera mengambil tindakan terhadap umat yang menjalankan ibadah haji tersebut. Para haji secara politis dinilai berbahaya. Pada tahun 1908, salah seorang missionaris Belanda, yang bernama Bogardt, menyatakan bahwa melarang pelaksanaan ibadah haji akan lebih baik daripada kemudian terpaksa harus menembak mati mereka.

Di atas telah dijelaskan bahwa pemerintah Belanda memberikan kebebasan bagi umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya. Di samping itu, pemerintah Belanda juga melakukan pengawasan yang ketat pada pelaksanaan ajaran agama Islam tersebut. Menunaikan ibadah haji merupakan bentuk ibadah yang dilakukan umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya. Harusnya, pemerintah Belanda bersikap netral dan membebaskan seluruh umat Islam dalam menjalankan ibadah haji tersebut. Maka, peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah Belanda dalam usaha membatasi, bahkan melarang umat Islam dalam menjalankan ibadah haji mendatangkan kritik, baik dari kalangan Islam maupun dari pihak orang-orang Belanda.

## 2. Bidang Pendidikan

Pemerintah Belanda melakukan pemisahan dalam bidang pendidikan di Indonesia, yaitu dengan dibangunnya pendidikan Belanda yang berlatar belakang pemahaman Barat. Sekolah yang dibangun oleh pemerintah Belanda tersebut juga diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi masyarakat yang berasal dari kalangan bangsawan Indonesia. Dalam pendidikan Barat tersebut, murid-murid dididik agar bersikap netral terhadap agama, bahkan sampai membuat murid-murid menjadi tidak peduli dengan agama. Hal itu dikarenakan dalam sekolah Belanda tidak diajarkan pendidikan agama Islam. Sistem

pendidikannya sekuler, dengan tidak memasukkan pendidikan agama Islam di dalam kurikulum. Pendirian sekolah Belanda tersebut melahirkan golongan yang disebut kaum intelek, dan bersikap kebarat-baratan, sehingga lupa terhadap ajaran agama Islam.

Dalam usaha asosiasi kebudayaan, pemerintah Belanda memanfaatkan faktor pendidikan, yaitu dengan membuka sekolah-sekolah Belanda dengan dilatar belakangi budaya Barat bagi masyarakat Indonesia. Menurut Snouck, dengan memberikan pendidikan kepada rakyat Indonesia, maka diharapkan tingkat loyalitas rakyat terhadap Belanda akan semakin meningkat, sehingga akan menghilangkan usaha-usaha pemberontakan rakyat terhadap Belanda. Belanda juga merasa berkewajiban moral untuk mendidik para bangsawan Indonesia dan menjadikannya *partner* dalam kehidupan budaya dan sosial. Partner tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan jurang pemisah antara pemerintah Belanda dengan rakyat Indonesia. Belanda mencita-citakan kemajuan Indonesia ala Barat yang tingkat penyesuaiannya akan ditentukan oleh pemerintah Belanda.

Sistem pola pendidikan yang ditawarkan Snouck ialah mengubah bangsawan tradisional Indonesia menjadi elit berpendidikan Barat. Belanda membangun sekolah HIS (*Hollands Inlands School*) yang hanya diperuntukan bagi keluarga bangsawan Indonesia. Kebijakan yang diberikan pemerintah Belanda dalam bidang pendidikan, tidak terlepas dari pola politik kolonialnya. Alasan penyelenggaraan pendidikan lebih ditekankan pada kepentingan pemerintah kolonial terhadap kepentingan rakyat jajahannya. Untuk itu, pemerintah Belanda tidak mendirikan sekolah yang diperuntukan bagi rakyat biasa, karena untuk menghindari rusaknya sistem pemerintahan kolonial yang berlaku di Indonesia. Pendidikan Barat yang diberikan Belanda itu diformulasikan sebagai

faktor yang akan menghancurkan kekuatan Islam di Indonesia.<sup>41</sup>

Masyarakat Islam Indonesia tidak tinggal diam dalam menghadapi segala macam usaha Belanda dalam menguasai Indonesia. Kesadaran bahwa pemerintah Belanda merupakan pemerintahan kafir yang menjajah bangsa dan agama mereka, semakin mendalam tertanam di benak rakyat, terutama golongan santri. Pesantren, yang merupakan pusat pendidikan Islam, pada waktu itu mengambil sikap anti-Belanda.

Usaha yang dilakukan Belanda dalam menangani masalah pendidikan Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat Islam ialah dengan mengeluarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan baru yang sangat menekan bangsa Indonesia, terutama masyarakat Islamnya. Salah satu kebijaksanaan pemerintah kolonial yang oleh umat Islam dirasakan sangat menekan adalah ordonansi guru.

Ordonansi pertama dikeluarkan pada tahun 1905 oleh pemerintah Belanda, yaitu mewajibkan setiap guru agama Islam untuk meminta dan memperoleh izin terlebih dahulu kepada pemerintah kolonial sebelum memberikan pengajaran dan melaksanakan tugasnya sebagai guru agama. Ordonansi kedua dikeluarkan pada tahun 1925, yaitu hanya mewajibkan guru agama untuk melaporkan diri. Kedua ordonansi ini dimaksudkan sebagai media pengontrol dalam mengawasi aktivitas para pengajar agama Islam, sehingga akan mencegah terjadinya pengajaran-pengajaran yang akan membahayakan kekuasaan pemerintah Belanda di Indonesia.

Setelah terjadinya peristiwa Cilegon pada tahun 1888, maka pada tahun 1890 dilakukan pengawasan terhadap pendidikan Islam, karena Belanda melihat bahwa perlawanan yang dilakukan masyarakat Cilegon tersebut dimotori oleh para haji dan para guru agama. Akhirnya di Jawa dilakukan perburuan terhadap guru agama. Dalam pengawasan terhadap guru agama tersebut, diperintahkan kepada para bupati untuk melaporkan

---

<sup>41</sup> *Ibid.* Hal. 49.

setiap tahun daftar guru agama di tiap-tiap daerahnya. Kemudian pada tahun 1904, Snouck Hurgronje memberikan saran agar pengawasan tersebut meliputi adanya surat izin khusus dari bupati kepada para guru agama, daftar tentang guru dan murid, serta pengawasan yang dilakukan oleh para bupati tersebut harus dilakukan oleh suatu panitia. Maka pada tahun 1905 dikeluarkan sebuah peraturan tentang pendidikan agama Islam yang disebut dengan Ordonansi Guru. Ordonansi guru tersebut berdasarkan Staatsblad 1905 no.550, yang isinya adalah sebagai berikut<sup>42</sup>:

- Seorang guru agama Islam harus dibenarkan mengajar bila sudah memperoleh izin dari Bupati.
- Izin tersebut baru diberikan bila guru agama tersebut jelas-jelas bisa dinilai sebagai orang baik, dan pelajaran yang diberikannya tidak bertentangan dengan keamanan ketertiban umum.
- Guru agama Islam tersebut harus mengisi daftar murid, disamping harus menjelaskan mata pelajaran yang diajarkan.
- Bupati atau instansi yang berwenang boleh memeriksa daftar itu sewaktu-waktu.
- Guru agama Islam bisa dihukum kurung maksimum delapan hari atau denda maksimum dua puluh lima rupiah, bila mengajar tanpa izin atau lalai mengisi/mengirimkan daftar tersebut; atau enggan memperlihatkan daftar itu kepada yang berwenang, berkeberatan memberi keterangan, atau enggan diperiksa oleh yang berwenang.
- Izin itu pun bisa dicabut bila ternyata berkali-kali guru agama tersebut melanggar peraturan, atau dinilai berkelakuan kurang baik.

Dalam pelaksanaannya, ordonansi guru ini bisa dipergunakan untuk menekan agama Islam. Padahal tujuan awal dibuatnya ordonansi guru ini adalah untuk mengawasi pendidikan Islam, bukan untuk

---

<sup>42</sup> *Perkara Agama Islam Bumiputera*, (Batavia: Departemen Pemerintahan Dalam Negeri, 1920), hlm. 1-25. Lihat, Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda: Het Kantoor voor Inlandsche Zaken*. Hal. 52-53.

menghambat atau menekannya.

Pengawasan terhadap pendidikan Islam yang dilakukan oleh pemerintah Belanda, selain diberikan kepada para guru yang mengajar, juga diterapkan kepada lembaga pendidikan Islam. Pada tahun 1923, pemerintah Belanda membuat suatu kebijaksanaan baru, yaitu bagi setiap orang yang hendak mendirikan suatu lembaga pendidikan, harus memberitahukan terlebih dahulu cara pengajaran dan tempat mengajarnya secara tertulis kepada kepala daerah setempat.

Kebijaksanaan ini dikeluarkan oleh pemerintah Belanda sebagai akibat dari semakin banyaknya didirikan sekolah swasta masyarakat Indonesia, yang dikenal sebagai "sekolah liar". Belanda melakukan pengawasan terhadap sekolah-sekolah yang dibangun oleh masyarakat Indonesia tersebut, untuk mencegah terjadinya pengajaran yang dapat membahayakan kekuasaan pemerintah Belanda, yaitu mengontrol dan mengendalikan perkembangan rasa nasionalisme rakyat Indonesia. Namun, usaha pemerintah Belanda untuk menekan sistem pendidikan Indonesia ternyata mendapat perlawanan keras dari masyarakat Indonesia, baik dari masyarakat Islamnya ataupun dari organisasi nasional.

Selain pendidikan Barat yang ditawarkan Belanda, di Indonesia sudah terdapat pendidikan yang bercorak Islam, yaitu pendidikan pesantren. Di dalam pesantren, para santri diajarkan untuk memahami ajaran agama Islam secara mendalam. Sehingga menghasilkan orang-orang yang taat menjalankan perintah agama.

Perlawanan terhadap pemerintah Belanda juga banyak yang dijalankan oleh para santri. Dalam menangani masalah pendidikan ini, pemerintah Belanda mengeluarkan kebijaksanaan dalam rangka menekan sistem pendidikan Islam. Pada tahun 1923, pemerintah Belanda mengeluarkan Ordonansi Pengawasan terhadap pendidikan di Indonesia, yaitu setiap orang yang hendak mendirikan suatu lembaga pendidikan,

harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada kepala daerah setempat, dengan menyebutkan cara pengajaran dan tempat mengajarnya.<sup>43</sup>

### 3. Pemanfaatan Adat

Perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia kepada pemerintah Belanda, kebanyakan juga merupakan perlawanan antara golongan ulama dengan kaum adat. Awalnya, hubungan antara golongan ulama dengan golongan adat dapat berjalan dengan baik dan mereka dapat hidup secara berdampingan dengan damai. Para ulama tidak akan mengusik kehidupan kaum adat dan tidak akan mengganggu kekuasaan para kepala adat, selama mereka tidak keluar dari jalur agama Islam. Para ulama akan menegur kaum adat apabila mereka melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama.

Belanda melihat adanya peluang pada kaum adat dalam membantu usaha Belanda melawan golongan ulama yang sangat sulit ditaklukan. Belanda akan menjadikan kaum adat sebagai alat dalam melawan golongan ulama. Kenyataan itu terjadi pada beberapa peristiwa perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, terutama yang beragama Islam dalam melawan kaum adat, yang dipengaruhi oleh Belanda.

Contohnya dalam Perang Diponegoro. Belanda selalu ikut campur dalam segala urusan pemerintahan Keraton, dengan maksud mencari massa dari kalangan bangsawan. Akhirnya Belanda berhasil memecah belah keadaan pemerintahan di dalam Keraton. Dengan begitu, penaklukan kepada golongan ulama yang melawan Belanda, akan dapat ditekan.

Keadaan yang sama terjadi pada saat perang Paderi. Awalnya, Belanda membuat keadaan sehingga kaum adat marah terhadap pihak golongan ulama, karena dianggapnya selalu ikut campur terhadap urusan-

---

<sup>43</sup> Aqib Suminto. *Politik Islam Hindia Belanda: Het Kantoort voor Inlandsche Zaken*. Hal. 58.

urusan adat. Atas pengaruh Belanda, para kepala adat juga menjadi khawatir, kekuasaannya di daerah tersebut akan diambil alih oleh para ulama. Karena mereka juga melihat, pengaruh kaum ulama semakin besar dalam masyarakat di daerahnya.

Pada tahun 1937, pemerintah Belanda mulai membatasi wewenang dan kekuasaan pengadilan agama. Perselisihan dalam persoalan waris dan waqaf diadili oleh pengadilan negeri berdasarkan pada hukum adat, dan bukan berdasarkan hukum Islam. Posisi pengadilan agama menjadi terletak dibawah pengadilan negeri, yang tidak berdasar pada hukum Islam. Kebijakan Belanda tersebut bertujuan untuk mengurangi peranan hukum Islam dalam masyarakat Indonesia.

#### 4. Memisahkan struktur masyarakat Islam

Pemerintah Belanda melakukan pemecahan pada golongan-golongan sosial masyarakat Islam. Semakin meningkatnya pengawasan politik oleh pihak Belanda telah menimbulkan perasaan tersingkir dan frustrasi yang mendalam di kalangan kaum elit agama.

Adanya kekuasaan Belanda secara berdampingan ini telah menimbulkan suatu situasi politik yang semakin tidak stabil. Pada dasarnya, dalam Islam juga dijalankan kegiatan politik, dan memiliki struktur kepemimpinan Islam. Pemimpin tertinggi dalam pelaksanaan politik Islam berada pada seorang Sunan, berasal dari kata Susuhunan (Suhu, dalam bahasa Cina artinya Guru). Seorang Sunan, biasa kita kenal dengan sebutan ulama, ialah seorang yang menguasai isi dan ajaran Islam yang terdapat di dalam al-Quran. Ia yang memberikan nasihat kepada Sultan (Raja) dalam menjalankan politik pemerintahannya. Dalam sistem pemerintahan Islam, keseluruhan aspek kehidupan masyarakat harus dijalankan berdasarkan pada perintah Allah swt yang terdapat dalam al-Quran.

Struktur kedua dalam sistem pemerintahan Islam ialah seorang Sultan. Secara struktur Islam, kedudukan Sultan berada di bawah Sunan. Namun, pelaksana pemerintahannya berada pada Sultan. Dalam segala aspek pemerintahan, Sultan yang memiliki hak dalam pengambilan keputusan, yaitu berdasarkan pada nasihat dari Sunan. Apabila seorang Sultan melakukan penyelewengan terhadap ajaran al-Quran, maka Sunan harus membenarkan tindakan Sultan dan mengembalikannya lagi kepada ajaran yang benar.

Sultan memerintah rakyat dalam sistem kemasyarakatan Islam. Seluruh masyarakat Islam, yang berada dalam sistem Islam tersebut wajib mematuhi segala perintah dari Sultannya, karena perintah yang diberikan oleh Sultan, merupakan perintah Allah. Berarti jika terdapat umat Islam yang tidak taat terhadap perintah Sultan, berarti dia tidak taat terhadap perintah Allah, dan harus diberikan hukuman berdasarkan aturan Islam pula yang terdapat di dalam al-Quran. Seorang Sultan juga wajib memberikan perlindungan dan pengaturan yang baik kepada seluruh rakyatnya. Sultan juga berkewajiban menyejahterakan seluruh masyarakatnya.

Sistem pemerintahan Islam seperti tersebut diatas yang dikacaukan oleh Belanda. Seorang Sunan yang faham terhadap ajaran al-Quran dibuat supaya lupa akan mengurus urusan politik. Belanda membuat sibuk para Sunan agar hanya menjalankan ajaran ibadah ritual saja demi bekal di akhirat nanti, tanpa memikirkan urusan duniawi.

Para Sultan dipengaruhi untuk hanya memikirkan kepentingannya sendiri saja di dunia, dan menjalankan sistem pemerintahan dengan terlepas dari ajaran Islam. Sultan diberikan janji akan mendapatkan kekuasaan yang lebih besar dan harta yang lebih banyak. Usaha Belanda ialah membuat umat-umat Islam tidak lagi menjalankan perintah agamanya dengan baik, dan melupakan perintah Allah di dalam al-Quran.



Sehingga dalam menjalankan perintah Allah tersebut, mereka menjalankannya dengan tidak utuh dan tidak secara keseluruhan. Pada saat seperti itu, masyarakat akan menjadi tidak terurus lagi dan sistem pemerintahan Islam akan menjadi kacau.

Dalam kejadian perang Aceh, Belanda melakukan usaha memisahkan struktur masyarakat Islam di Aceh dalam menghadapi Islam. Para ulama dibuat sibuk dalam menjalani aktivitas keagamaan. Para elit birokrat, yang dikenal dengan istilah *uleebalang*, diberikan harta yang melimpah dan kekuasaan yang lebih besar jika mereka tunduk kepada pemerintah Belanda. Usaha Belanda itu menyebabkan beberapa ulama dan *uleebalang* menjadi tunduk dan memihak dengan Belanda.

Usaha Belanda itu tidak seluruhnya berhasil dalam menghancurkan struktur pemerintahan Islam. Tidak seluruh lapisan masyarakat Islam terpengaruh oleh Belanda. Namun, ada juga raja-raja pada beberapa kerajaan Islam yang terkena bujuk rayu dari pemerintah Belanda.